

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda antara tahun 1830 hingga akhir abad ke-19 dinamakan “Culturstelsel” (Tanam Paksa). Sistem tanam paksa di Jawa dimulai atas gagasan Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch. Aspek normatif yang menonjol dari sistem ini yakni penderitaan rakyat, dimana sesungguhnya rakyat khususnya petani dipaksa untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia untuk meningkatkan perekonomian negeri Belanda.

Pada tahun 1830, keadaan keuangan di Hindia Belanda serta negeri Belanda sendiri sangat buruk akibat dari biaya Perang Belgia dan Perang Diponegoro. Untuk menghindari kekosongan kas dan kebangkrutan, Hindia Belanda khususnya Jawa diarahkan agar hanya menghasilkan barang-barang yang dapat dipasarkan di dunia. Ciri utama dari sistem tanam paksa adalah keharusan bagi masyarakat pribumi untuk membayar pajak mereka dalam bentuk barang, yaitu hasil-hasil pertanian mereka. Setiap desa diharuskan menanam 1/5 dari tanahnya dengan jenis tanaman yang hasilnya dapat diekspor dengan mendapat kebebasan bayar pajak tanah.

Tanaman dagangan terpenting selama masa ini adalah kopi, gula, dan nila (indigo). Pentingnya ketiga tanaman ini tidak hanya terlihat dari luas tanah yang disediakan, tetapi juga dari jumlah orang yang terlibat dalam penanamannya.

Pekerjaan wajib ini merupakan beban berat bagi masyarakat desa, bahkan kadang-kadang seluruh desa dikerahkan bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonial. Menurut penelitian Prof. Fasseur dari Universitas Leiden, pada tahun 1840 sekitar 75,5 % dari penduduk Jawa dikerahkan dalam tanam paksa, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ini jelas menekan penduduk Jawa (Leirissa, 1996: 54). Dalam penyelenggaraannya, pihak Belanda berusaha sedapat mungkin untuk tidak berhubungan langsung dengan petani. Oleh sebab itu pelaksanaannya diserahkan kepada bupati, para kepala desa, dan masyarakat itu sendiri.

Hasil dari sistem tanam paksa ini telah menimbulkan *batig slot* (saldo untung) bagi pemerintah kolonial Belanda sebesar f 967 juta dalam periode 1832 hingga 1867 dan f 287 juta dari tahun 1867 hingga 1877 (LP3ES, 1995: 28). Dengan memperoleh laba sebesar itu, pelbagai hutang dapat dilunasi, kesulitan keuangan di negeri Belanda pun dapat diatasi. Selain itu juga, hal tersebut dapat mendorong kemajuan dalam perdagangan dan pelayaran Belanda.

Baru pada tahun 1870, dengan diberlakukannya Undang-Undang Agraria (*Agrarischewet*), sistem tanam paksa dihapuskan secara bertahap hingga awal abad ke-20. Dengan dihapuskannya sistem ini telah memberi peluang bagi pihak swasta dalam dunia usaha untuk menggantikan peran pemerintah pada masa sebelumnya. Modal swasta diberi peluang sepenuhnya untuk mengusahakan kegiatan di Hindia Belanda khususnya perkebunan-perkebunan besar di Jawa maupun daerah-daerah di luar Jawa. Dengan adanya Undang-Undang Agraria tahun 1870 ini menimbulkan perubahan dari sistem tanam paksa ke penanaman modal perusahaan-perusahaan swasta di Jawa. Selain daripada itu, hal ini

menimbulkan perubahan bagi desa karena kerja wajib diubah menjadi kerja upah dan penyerahan wajib tanah diganti dengan persewaan tanah (Burger, 1970: 117). Di satu pihak Undang-Undang ini melindungi hak milik petani pribumi atas tanah mereka, dipihak lain Undang-Undang Agraria ini telah membuka peluang bagi orang-orang asing untuk menyewa tanah dari penduduk pribumi.

Perubahan politik di negeri Belanda dengan kemenangan orang-orang Liberal, pada akhirnya akan mempengaruhi situasi politik di Hindia Belanda. Para penganut paham Liberalisme tidak dapat menyetujui tanam paksa sebagai suatu sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Kelompok Liberal menilai bahwa campur tangan dari pihak pemerintah dalam kehidupan ekonomi yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, justru mempunyai akibat yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Salah satu tindakan yang seharusnya dilakukan agar kesejahteraan masyarakat pribumi dapat meningkat salah satunya yaitu dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat pribumi agar milik mereka tidak disalahgunakan. Pada saat itulah proses Liberalisasi ekonomi mulai berlangsung di Hindia Belanda, sehingga antara tahun 1870 sampai dengan tahun 1900 disebut masa Liberal.

Perkebunan-perkebunan besar di Jawa mengalami perkembangan yang cukup pesat selama masa Liberal, hal ini tentu saja mendatangkan keuntungan yang cukup besar bagi para pihak swasta Belanda maupun pemerintah kolonial. Dilain pihak, tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa semakin mundur. Sehingga harapan para penganut Liberal mengenai kemakmuran yang lebih tinggi bagi

masyarakat pribumi yang akan dibawa ekonomi Liberal tidak terwujud. Adanya krisis pada 1885 yang dialami oleh perkebunan-perkebunan juga membawa pengaruh buruk bagi masyarakat Jawa. Hal ini berarti telah terjadi penyempitan penghasilan bagi masyarakat pribumi, baik yang berupa upah bagi pekerjaan di perkebunan maupun yang berupa sewa tanah. Jika masyarakat Jawa secara rata-rata memperoleh pembayaran untuk sewa tanah sebanyak f 42,48 untuk satu bau selama tanam paksa, maka pada tahun 1900 angka ini telah menurun sampai f 25 untuk satu bau.

Semakin meningkatnya arus lalu lintas perdagangan dan perindustrian di Hindia Belanda terutama yang berasal dari perkebunan dengan masuknya modal-modal swasta, maka di kalangan perusahaan-perusahaan dagang dan pertanian Belanda sangat dirasakan perlu adanya suatu lembaga keuangan atau bank di Hindia Belanda yang dapat membantu kegiatan mereka dalam perdagangan. Bukan saja dari kalangan swasta Belanda yang mengharapkan bantuan modal dari negara asalnya, juga pemerintah Hindia Belanda sangat memerlukan bantuan dan pinjaman dari pemerintah Belanda, terutama untuk membiayai Perang Diponegoro (1825-1830). Selain daripada itu, pembentukan sebuah bank sangat diperlukan untuk segera mengisi kekurangan alat pembayaran yang telah dirasakan sangat mendesak oleh karena peredaran uang hampir seluruhnya terdiri dari uang tembaga.

Adanya permasalahan tersebut di atas maka didirikanlah *De Javasche Bank* yang merupakan suatu lembaga keuangan yang berkantor pusat di Hindia Belanda pada tahun 1828 atas perintah Raja Willem I melalui Surat Perintahnya

tanggal 29 Desember 1826. Fungsi dan peranan *De Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi berkembang secara gradual berdasarkan oktrooi yang dikeluarkan dari waktu ke waktu. *De Javasche Bank* diberi posisi monopoli dalam pengeluaran uang kertas, dan juga bergerak di bidang komersial dengan menerima deposito, memberikan kredit, mengaksep wesel serta melakukan jual beli emas dan perak batangan.

Pada mulanya *De Javasche Bank* memprioritaskan kegiatan kreditnya kepada pihak importir dengan jaminan surat berharga (*promissory notes*). Sampai dengan tahun 1850-an, *De Javasche Bank* merupakan satu-satunya lembaga swasta bangsa Belanda yang berkantor pusat di Hindia Belanda yang memberikan pinjaman kepada importir dan pengusaha-pengusaha perkebunan swasta. Pada tanggal 11 Maret 1828, Komisaris Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan Surat Keputusan tentang uang kertas pertama yang diterbitkan dengan beberapa ketentuan. Tingkat suku bunga pinjaman yang ditetapkan pada tanggal 5 April 1828 adalah 0,75 % per bulan, sedangkan pinjaman dengan jaminan uang asing ditetapkan sebesar 0,5 % dan dengan jaminan emas dan perak (Hartono, 1976: 19).

Dibentuk di sebuah negara agraris seperti Hindia Belanda, *De Javasche Bank* pada mulanya dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak tahu menahu mengenai persoalan perbankan. Manajemen tidak mempunyai gambaran tentang fungsi bank sirkulasi, berapa modal yang dibutuhkan untuk bisa beroperasi dan berapa jumlah uang yang perlu diedarkan ke seluruh negeri. Oktrooi pertama tidak memberikan penjelasan tentang tata cara peredaran uang. Pasal 33 oktrooi

pertama hanya menyebutkan bahwa *De Javasche Bank* harus mengandalkan kepada modal bank sendiri, ditambah dengan uang muka dan deposito.

De Javasche Bank dapat berkembang dengan baik, karena uang kertas yang dikeluarkan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dalam periode oktrooi pertama, keuntungan *De Javasche Bank* masih sangat kecil, sekalipun tingkat keuntungan terus meningkat. Kekuatan *De Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi sebenarnya masih sangat kecil. Menjelang berakhirnya masa oktrooi ketiga pada tahun 1846, pemerintah membuat peraturan sementara yang dikukuhkan pada oktrooi ketiga tahun 1848. Peraturan ini lebih ketat daripada peraturan sebelumnya, oktrooi 1848 mencantumkan batas jumlah uang kertas yang dapat diterbitkan oleh *De Javasche Bank*. Peraturan tentang ketentuan batas maksimum itu ditetapkan dalam situasi yang tidak menguntungkan dalam periode dimana sistem tanam paksa mulai mengalami kemerosotan. Pada masa itu, peranan swasta mulai meningkat begitupun permintaan terhadap kredit ikut meningkat (LP3ES, 1995: 38).

Pada awal abad ke-20, perlu dicatat mengenai perkembangan peranan *De Javasche Bank* yang cukup penting yaitu dalam penyelenggaraan kliring pada tanggal 15 Februari 1909 yang dilakukan oleh kantor cabang Surabaya dan Semarang untuk pertama kalinya. Dalam oktrooi kedelapan tahun 1906-1921, *De Javasche Bank* diperbolehkan untuk membuka bank koresponden di luar Hindia Belanda sehingga dapat menaruh depositonya sebagai cadangan dalam mata uang asing di luar negeri. Pada waktu itu berlaku sistem pertukaran berdasarkan emas

(*gold-exchange system*), nilai *gulden* dalam nilai tukar Internasional dipertahankan melalui negosiasi wesel-wesel luar negeri.

Menjelang abad ke-20 di seluruh Hindia Belanda, *De Javasche Bank* baru mempunyai 7 kantor cabang (*agentschap*). Pada tanggal 15 Mei 1891, *De Javasche Bank* sudah membuka kantor cabang di Amsterdam dengan sebutan *Bijbank Amsterdam*, pembukaan kantor ini berkaitan dengan kewajiban *De Javasche Bank* dalam menjaga kurs mata uang *gulden* Hindia Belanda terhadap mata uang *gulden* Belanda. Hal ini mempunyai nilai tersendiri dalam perjanjian kerjasama antara *De Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi untuk Hindia Belanda dengan *De Nederlandsche Bank* sebagai bank sentral negeri Belanda.

Perjanjian kerjasama dengan *De Nederlandsche Bank* berkaitan dengan dua konsep, pertama pari *overeenkomst* dan kedua *earmakovereenkomst*. Yang pertama adalah kesepakatan untuk mempertahankan paritas 1 banding 1 antara *gulden* Hindia Belanda dengan *gulden* Belanda, sehingga terjadi kesatuan mata uang dari kedua wilayah itu, baik dalam pemindahbukuan maupun pengiriman uang melalui Jakarta dan Amsterdam. Dalam kesepakatan kedua, *De Nederlandsche Bank* membuka suatu titipan logam mulia dari *De Javasche Bank* dengan maksud untuk mempermudah *De Javasche Bank* menjaga nilai jaminan pada taraf yang dikehendaki (LP3ES, 1995: 40).

Menghadapi persaingan domestiknya dengan bank-bank komersil, *De Javasche Bank* mempunyai kedudukan yang menguntungkan, hal ini sesuai dengan hak mencetak uangnya yang dapat mempengaruhi situasi perkreditan secara efektif. Di sisi lain, *De Javasche Bank* juga memiliki kewajiban untuk

menjaga rasio cadangan emas dan perak terhadap uang yang beredar, juga untuk menjaga kestabilan moneter. Walaupun dapat bersaing dengan bank-bank lain dengan memberikan pinjaman tingkat bunga rendah, *De Javasche Bank* mengambil kebijakan kredit yang selektif dan mengarahkan pinjamannya kepada perusahaan-perusahaan besar Eropa di bidang ekspor dan para pedagang besar Cina saja. Dengan kebijakan ini, dari segi kuantitatif, persaingan *De Javasche Bank* dengan bank-bank komersil lainnya tidak menjadi terlalu mencolok.

Menjelang berakhirnya oktrooi kedelapan, diundangkan *De Javasche Bankwet* pada tanggal 31 Maret 1922. Kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang tanggal 30 April 1927 dan Undang-Undang tanggal 13 November 1930, yang seterusnya berlaku bagi *De Javasche Bank* hingga berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No. 11 Tahun 1953. Dengan Undang-Undang itu kedudukan *De Javasche Bank* sebagai satu-satunya bank sirkulasi di Hindia Belanda menjadi lebih kokoh, sekalipun masih dibatasi 15 tahun sejak 1 April 1922 dan diperpanjang 5 tahun lagi sejak tahun 1937 hingga berakhir pada tahun 1942. Akan tetapi pengawasan dari pemerintah Hindia Belanda menjadi lebih ketat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai *De Javasche Bank* pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda 1900-1942. Masih kurangnya penulisan mengenai lembaga keuangan dan perbankan Indonesia khususnya mengakibatkan peneliti merasa tertarik untuk lebih mengkajinya. Selain itu, alasan peneliti lainnya adalah karena *De Javasche Bank* merupakan cikal bakal bank sentral Indonesia yakni

Bank Indonesia yang kemudian dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1953.

Kajian mengenai *De Javasche Bank* ini belum pernah dilakukan di UPI, khususnya di Jurusan Pendidikan Sejarah. Hal itu juga yang menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut. Kurun waktu yang dipilih yakni dari tahun 1900-1942, karena tahun 1900 merupakan tahun yang penting bagi perkembangan Indonesia selanjutnya. Pada kurun waktu tersebut, di Hindia Belanda mengalami masa Liberal yang salah satu dampaknya yaitu dengan masuknya modal-modal swasta di Hindia Belanda untuk mendirikan perkebunan-perkebunan. Selain itu juga, tepatnya pada tahun 1901 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan suatu kebijakan yang dikenal dengan Politik Etis yang merupakan politik balas budi pemerintah kolonial Belanda terhadap tanah jajahannya yaitu Hindia Belanda, Pada tahun 1942 dipilih sebagai akhir tahun dalam penulisan skripsi ini karena adanya pergantian kekuasaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada pemerintah Pendudukan Jepang.

1.2. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok uraian di atas, terdapat permasalahan yang akan menjadi kajian penulisan skripsi ini yaitu “Mengapa *De Javasche Bank* memberikan perhatian yang lebih terhadap perkembangan perekonomian Hindia Belanda khususnya perkebunan-perkebunan swasta?”.

Agar permasalahan dapat difokuskan, maka peneliti akan membatasi permasalahan dengan merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya *De Javasche Bank* ?
2. Bagaimana perkembangan *De Javasche Bank* pada tahun 1900-1942 ?
3. Bagaimana keterlibatan *De Javasche Bank* terhadap pertumbuhan perekonomian di Hindia Belanda pada tahun 1900-1942 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperkaya penulisan Karya Ilmiah bertema Sejarah Perekonomian di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia umumnya dan Jurusan Pendidikan Sejarah khususnya, sedangkan tujuan khususnya yaitu berdasarkan rumusan dan batasan masalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan latar belakang berdirinya *De Javasche Bank* dengan melihat kondisi politik negeri Belanda akhir abad ke-19 serta kondisi sosial, ekonomi, politik Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20.
2. Menjelaskan perkembangan *De Javasche Bank* yang meliputi aspek pendiri, modal awal, struktur organisasi, perkembangan kantor-kantor cabang *De Javasche Bank*.

3. Mengidentifikasi keterlibatan *De Javasche Bank* terhadap perekonomian di Hindia Belanda yang meliputi aspek kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan serta usaha-usaha yang dilakukan dalam memperlancar arus lalu lintas perdagangan di Hindia Belanda tahun 1900-1942.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang antara lain untuk memperkaya penulisan karya ilmiah bertema Sejarah Perekonomian di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia umumnya dan Jurusan Pendidikan Sejarah khususnya. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang masalah perekonomian Hindia Belanda tahun 1900-1942 khususnya yang berhubungan dengan perbankan di Hindia Belanda yang diwakili oleh *De Javasche Bank*, sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana peranan *De Javasche Bank* dalam perekonomian di Hindia Belanda tahun 1900-1942. Pada akhirnya peneliti mengharap penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya.

1.5. Metode dan Teknik Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Metodologi yang peneliti gunakan dalam mengkaji permasalahan dalam skripsi ini adalah metode historis atau metode sejarah. Metode historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan

masa lampau dan menuliskan hasilnya berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh yang disebut dengan historiografi (Gottschalk, 1975: 32). Disamping itu, metode sejarah adalah suatu cara bagaimana mengetahui sejarah (Sjamsuddin, 1996: 3). Jadi metode ini digunakan karena sesuai dengan karakteristik dari objek kajian penelitian ini, yaitu berupa kajian perekonomian masyarakat pada masa lampau.

Agar dapat mengumpulkan data dan menganalisis fakta dengan baik, maka peneliti menggunakan proses atau langkah-langkah seperti yang dijelaskan oleh Helius Sjamsuddin yaitu sebagai berikut:

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber-sumber Sejarah)

Heuristik adalah suatu kegiatan atau proses mencari dan mengumpulkan jejak atau sumber-sumber sejarah, baik sumber primer maupun sumber sekunder yang berhubungan dengan *De Javasche Bank*. Peneliti mencari sumber-sumber literatur berupa buku-buku dan dokumentasi lainnya dengan cara mengunjungi perpustakaan, karena perpustakaan merupakan tempat yang paling cocok untuk menemukan apa yang peneliti butuhkan atau cari dan relevan dengan permasalahan yang peneliti kaji.

2. Kritik (Menilai Sumber Sejarah)

Kritik yaitu proses analisis terhadap sumber yang telah diperoleh apakah benar relevan dengan masalah penelitian atau tidak. Kritik memiliki dua aspek, kritik eksternal yaitu dilakukan dengan cara memilih-milih buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji, sedangkan kritik internal dilakukan dengan cara membandingkannya dengan sumber-

sumber yang lain. Fungsi kritik sumber bagi sejarawan adalah mencari kebenaran, maka sejarawan dihadapkan untuk dapat membedakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang mungkin dan apa yang meragukan. Peneliti berusaha mengkritisi sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan peranan *De Javasche Bank* dalam perekonomian di Hindia Belanda 1900-1942, sehingga dapat diperoleh fakta-fakta mengenai kondisi sosial ekonomi Hindia Belanda serta keterlibatan *De Javasche Bank* dalam perekonomian Hindia Belanda.

3. Interpretasi (Menafsirkan Sumber Sejarah)

Interpretasi adalah proses penafsiran dan penyusunan fakta-fakta untuk merekonstruksi suatu peristiwa. Dalam tahap ini peneliti memberikan penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah yang memuat fakta-fakta yang relevan dengan pembahasan skripsi ini yaitu mengenai Peranan *De Javasche Bank* dalam Perekonomian di Hindia Belanda 1900-1942, yang dibarengi dengan memberikan analisis yang pada akhirnya untuk memperoleh kesimpulan.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi merupakan puncak dalam prosedur penelitian sejarah dan merupakan bagian terakhir dari metode sejarah. Historiografi merupakan proses penyusunan dan penuangan seluruh hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan. Dalam penulisan sejarah, digunakan secara bersamaan tiga bentuk teknik dasar penulisan yaitu deskripsi, narasi, dan analisis. Tulisan

yang peneliti buat adalah Peranan *De Javasche Bank* dalam Perekonomian di Hindia Belanda 1900-1942.

1.5.2. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah teknik studi kepustakaan, yaitu cara meneliti dengan mempelajari sumber-sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip-arsip, majalah, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan sumber-sumber tersebut, peneliti melakukan kunjungan pada perpustakaan-perpustakaan. Setelah literatur terkumpul dan dianggap memadai untuk bahan penulisan ini serta fakta-fakta telah ditemukan, selanjutnya peneliti pelajari, mengkaji, dan mengklasifikasikan. Setelah itu memisahkan sumber-sumber yang kurang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang peneliti buat untuk mempermudah memahami skripsi ini adalah:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan dikemukakan pokok-pokok pikiran yang akan dibahas dalam skripsi ini yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, metode dan teknik penulisan serta sistematika penulisan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu sejarah.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisikan pemaparan beberapa sumber kepustakaan yang menjadi rujukan peneliti dalam mengkaji topik permasalahan yang akan dibahas. Hasil dari studi literatur tersebut dijadikan sebagai bahan pijakan untuk memperoleh dan membangun landasan teoritis dan kerangka berfikir, sehingga peneliti dapat mempelajari permasalahan yang akan dikaji secara mendalam.

Bab III Metodologi Penelitian, menguraikan langkah-langkah dalam melakukan penelitian serta teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pencarian sumber, pengolahan sumber dengan melakukan kritik eksternal dan internal, interpretasi, yakni menganalisis dan melakukan sintesis terhadap fakta-fakta yang telah didapat dari kegiatan kritik, dan yang terakhir adalah historiografi, yakni penulisan laporan penelitian sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia.

Bab IV *De Javasche Bank* dan pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda tahun 1900-1942, memuat uraian penjelasan dan analisis dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam rumusan masalah pada bab I. Peneliti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yaitu apa yang menjadi latar belakang berdirinya *De Javasche Bank*, bagaimana perkembangan *De Javasche Bank* pada tahun 1900-1942, serta bagaimana keterlibatan *De Javasche Bank* terhadap perkembangan perekonomian di Hindia Belanda.

Bab V Kesimpulan, dalam bab ini akan diungkapkan mengenai kesimpulan dari masalah-masalah yang terdapat dalam rumusan masalah secara keseluruhan dan merupakan jawaban atas masalah-masalah tersebut.